

KOLABORASI QUADRUPLE HELIX DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN MENUJU KABUPATEN BANYUWANGI LAYAK ANAK

Amanda Marsha Firdaus, Hary Priyanto, Niko Pahlevi Hentika

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

Email: marshafirdaus24@gmail.com, harysangabi@gmail.com, nikopahlevi@gmail.com

Abstrak

Anak jalanan di Kabupaten Banyuwangi, terutama di kawasan *traffic light*, menjadi masalah sosial yang kompleks, mencerminkan kemiskinan struktural dan kurangnya perlindungan terhadap hak anak. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan anak, tetapi juga menunjukkan tantangan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Kolaborasi antara pemerintah dan berbagai *stakeholder*, termasuk sektor swasta, akademisi, dan NGO, sangat penting untuk menangani isu ini secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kolaborasi *quadruple helix* dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *quadruple helix*, melibatkan analisis mendalam tentang peran masing-masing aktor dalam kolaborasi ini. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Agustus 2024 hingga Februari 2025, dengan melibatkan informan kunci dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara *stakeholder* memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan melalui berbagai program dan inisiatif. Namun, tantangan koordinasi antar aktor masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Diperlukan integrasi pendekatan strategis untuk memastikan keberlanjutan program yang berfokus pada kesejahteraan anak. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan *stakeholder* lainnya merupakan kunci dalam menangani masalah anak jalanan. Upaya lebih lanjut dalam meningkatkan koordinasi dan integrasi strategi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan program dan peningkatan kesejahteraan anak di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dan pihak terkait dalam menciptakan sistem yang lebih baik untuk perlindungan anak.

Kata kunci: Kolaborasi, Anak jalanan, *Quadruple Helix*, Kabupaten Layak Anak.

Abstract

Street children in Banyuwangi Regency, especially in traffic light areas, are a complex social problem, reflecting structural poverty and a lack of protection for children's rights. This phenomenon not only has an impact on children's welfare, but also shows the challenges faced by society and the government in creating a safe and supportive environment for children. Collaboration between the government and various stakeholders, including the private sector, academia, and NGOs, is essential to address this issue holistically. This study aims to explore the effectiveness of quadruple helix collaboration in improving the welfare of street children in Banyuwangi Regency. The method used is qualitative with a quadruple helix approach, involving an in-depth analysis of the role of each actor in this collaboration. Data was collected through interviews, observations, and documentation from August 2024 to February 2025, involving key informants from various backgrounds. The results of the study show that collaboration between stakeholders has great potential in improving the welfare of street children through various programs and initiatives. However, the challenge of coordination between actors is still a major obstacle to policy implementation. An integrated strategic approach is needed to ensure the sustainability of programs that focus on children's welfare. The conclusion of this study emphasizes that effective collaboration between the government and other stakeholders is the key in dealing with the problem of street children. Further efforts in improving coordination and integration of strategies are urgently needed to achieve the goals of program sustainability and improving child welfare in Banyuwangi Regency. This research is expected to provide recommendations for policymakers and related parties in creating a better system for child protection.

Keywords: Collaboration; Street Children, *Quadruple Helix*, Child-Friendly Regency.

*Correspondence Author: Amanda Marsha Firdaus
Email: marshafirdaus24@gmail.com



PENDAHULUAN

Keberadaan anak jalanan menjadi permasalahan sosial yang terlihat kontras di Kabupaten Banyuwangi, terutama di kawasan *traffic light* (Alem & Laha, 2016; Megaretta & Trisno, 2021). Kehadiran mereka tidak hanya menggambarkan kemiskinan struktural, namun juga kurangnya perlindungan terhadap hak anak, serta keterbatasan akses anak jalanan terhadap pendidikan dan kesejahteraan.

Setiap anak di Kabupaten Banyuwangi berhak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung dimana mereka dapat mencapai potensi terbaik mereka (Dwiki Faiz Sarvianto, 2020; Mappasere & Suyuti, 2019). Melihat berbagai resiko di jalanan, maka jalanan bukanlah lingkungan yang tepat bagi mereka. Banyak anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan terpaksa memanfaatkan jalanan sebagai sumber penghidupan atau tempat tinggal, yang dapat mengancam pertumbuhan dan kesejahteraan mereka. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan seluruh *stakeholder* memainkan peran penting dalam membangun serta menciptakan lingkungan yang dapat melindungi dan menjaga kesejahteraan anak jalanan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Anak jalanan yang sebagian besar merupakan bagian penting dari generasi muda sebagai penerus di Kabupaten Banyuwangi. Membangun dan mensejahterakan kehidupan anak sedini mungkin merupakan bagian dari mempersiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kualitas yang baik. Anak-anak harus menerima perlindungan dari berbagai pihak. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah memiliki program untuk memastikan perlindungan anak yang berkelanjutan, suatu program yang mana mengedepankan kesejahteraan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk melindungi anak dari korban kekerasan, memenuhi hak dasarnya, serta menjauhkan dari upaya eksploitasi anak yang seringkali terjadi di kalangan masyarakat.

Ayat 8 pada Pasal 1 dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak menjelaskan, “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.” Prinsip perda tersebut sesuai dengan Ayat 2 pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kerap menjadi perbincangan (Dwiki Faiz Sarvianto, 2020). Selain faktor kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah, ketidakstabilan ekonomi juga turut serta menjadi alasan meningkatnya angka kemiskinan di suatu wilayah. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu aspek yang melatar belakangi munculnya anak jalanan (Gayapersad et al., 2023; Julien, 2022).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih belum sepenuhnya optimal dengan menjangkau keseluruhan anak jalanan dan memberdayakan mereka. Melalui pendekatan *quadruple helix* yang melibatkan pemerintah sebagai pelaku pembuat kebijakan dan pengatur regulasi, sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pendanaan serta penyediaan penyelenggaraan pelatihan keterampilan, akademisi yang menyediakan

analisis berbasis penelitian, serta komunitas dan NGO sebagai jembatan antara anak jalanan dan aktor lainnya. Keempat aspek tersebut diharapkan dapat berkolaborasi dalam mengoptimalkan program-program yang berkelanjutan dan berfokus pada pemberdayaan anak jalanan. Kolaborasi antar aktor tidak hanya penting untuk menyediakan solusi, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang dapat mencegah munculnya kembali permasalahan serupa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menerapkan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif (Mappasere & Suyuti, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model kolaborasi *quadruple helix* yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu pemerintah, swasta, akademisi, dan NGO atau komunitas dalam menangani anak jalanan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini, *Non-Governmental Organizations* (NGO) berperan penting sebagai salah satu aktor dalam model kolaborasi *quadruple helix* untuk menangani masalah anak jalanan di Kabupaten Banyuwangi. NGO berfungsi sebagai penghubung antara anak jalanan dan *stakeholder* lainnya, seperti pemerintah dan sektor swasta, dengan memberikan pemahaman tentang kondisi lokal dan kebutuhan spesifik anak. Mereka juga berkontribusi dalam pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta melakukan advokasi untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Dengan keterlibatan NGO, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, tetapi juga menyoroti peran vital NGO dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan dan efektif bagi anak jalanan. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh informasi terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 melalui kolaborasi *quadruple helix* pada anak jalanan di *traffic light* Kabupaten Banyuwangi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, dan penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2024 sampai bulan Februari 2025.

Data primer didapatkan melalui metode wawancara dengan informan yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk menetapkan informan sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, peneliti menetapkan Henik Setyorini selaku Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DinsosPPKB) Kabupaten Banyuwangi sebagai informan kunci. Anak jalanan dengan rentang usia 6-18 tahun sebagai informan utama, serta masyarakat umum sebagai informan tambahan. Data sekunder merupakan hasil kajian pustaka serta data yang sudah ada yang memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti (Zakiah & Priyanto, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Sebagai Akar Dari Keberadaan Anak Jalanan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kerap menjadi perbincangan. Selain faktor kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah, ketidakstabilan ekonomi juga turut serta menjadi alasan meningkatnya angka kemiskinan di suatu wilayah (Priyanto & Noviana, 2023). Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu aspek yang melatar belakangi munculnya anak jalanan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang tidak luput dari permasalahan anak jalanan, mulai dari yang mengamen, mengemis, hingga menjajakan

makanan ringan, dan air mineral di kawasan lampu lalu lintas pada beberapa sudut kota di Kabupaten Banyuwangi. Fenomena kemiskinan sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya anak jalanan di *traffic light* Kabupaten Banyuwangi. Salah satu kemiskinan yang paling mempengaruhi perolehan hak anak jalanan ialah kemiskinan rumah tangga. Kemiskinan rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendidikan saja, melainkan juga kurangnya kesempatan yang terbuka.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyuwangi terus mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Berdasarkan data garis kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, penurunan jumlah penduduk miskin dapat dilihat dari perbandingan persentase pada tahun 2020 sebesar 8,06% dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023 sebesar 7,34%. Meski demikian, angka tersebut masih dapat dikategorikan tinggi sehingga kemiskinan turut serta melatarbelakangi keberadaan anak jalanan. Sebagaimana tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyuwangi, 2020-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2020	373.679	130,37	8,06
2021	387.084	130,93	8,07
2022	414.879	112,01	7,51
2023	448.928	119,52	7,34

Sumber: BPS Kabupaten Banyuwangi (2024)

Informan Khotimah anak jalanan usia 16 tahun menyampaikan: “Saya dengan terpaksa berhenti sekolah untuk membantu orang tua mencari uang. Jika tidak, kami tidak bisa makan. Saya juga perlu memberi makan anak saya.” (Hasil wawancara, Oktober 2024). Dari penyampaian tersebut, dapat diketahui keadaan yang mendesak mereka untuk berhenti bersekolah karena terkendala pada biaya. Padahal pendidikan merupakan kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Tanpa pendidikan yang layak, anak-anak jalanan akan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga mereka berisiko untuk terus hidup dalam kemiskinan. Pendidikan akan membawa dan mengubah kualitas hidup para anak jalanan. Terlepas dari penyebab putus sekolah yang telah disebutkan, beberapa anak jalanan ada yang memilih untuk tidak menamatkan sekolah karena rasa malas untuk berpikir dalam proses belajar.

Informan Khotimah anak jalanan usia 16 tahun menyampaikan: “Lebih baik cari uang di jalanan, meski dalam sehari kurang lebih mendapat Rp 50.000. Itu cukup untuk makan keluarga saya.” (Hasil wawancara, Oktober 2024). Meski demikian, aktivitas anak jalanan dalam mencari nafkah di jalanan khususnya di kawasan *traffic light* tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut karena dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Selain itu, aktivitas tersebut dilarang sebagaimana Huruf g pada Pasal 28 dalam Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang menjelaskan terkait larangan untuk menjalankan aktivitas mengemis, mengamen, dan berdagang di jalanan protokol atau *traffic light*.

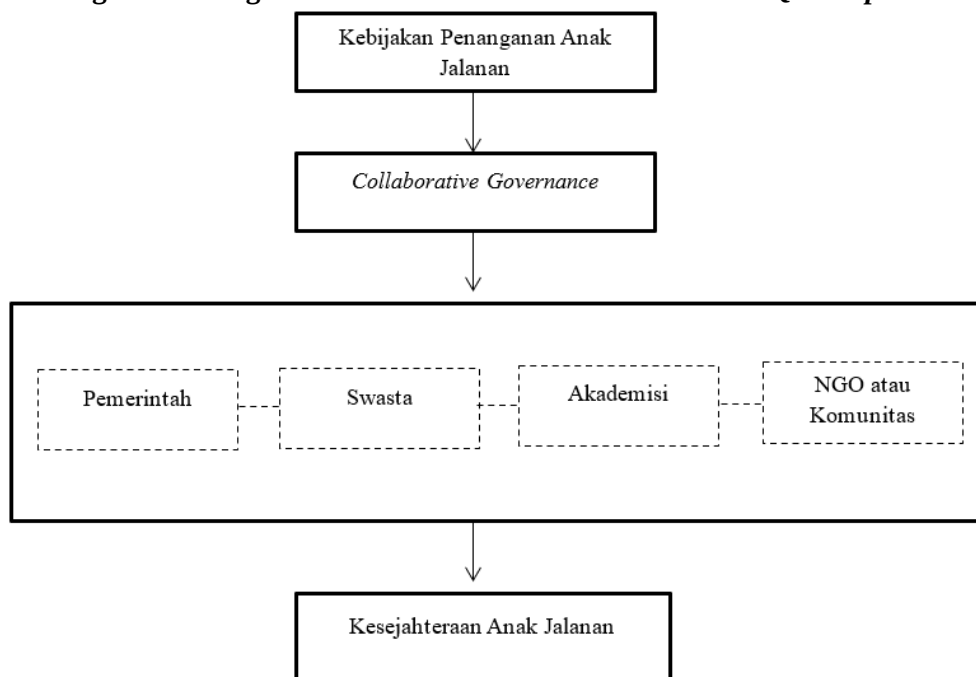
Penanganan Anak Jalanan Melalui Kolaboratif *Quadruple Helix*

Program pemerintah sejatinya merupakan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (Ali et al., 2021). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menangani fenomena anak jalanan melalui kebijakan publik. Kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah anak jalanan, namun juga sebagai wujud hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat.

Unsur Pemerintah menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah anak jalanan, sedangkan masyarakat melalui partisipasinya, dapat memberi dukungan terhadap implementasi kebijakan supaya dapat berjalan efektif. Dalam penelitian ini, *quadruple helix* dianggap sebagai suatu pendekatan yang menjelaskan timbulnya kebijakan dan inovasi yang lahir melalui hubungan yang berkesinambungan antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta komunitas. Melalui keempat aspek tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan peran masing-masing dalam berkolaborasi menjalankan kebijakan. *Collaborative governance* menjadi penting karena dalam implementasi pembangunan kerap mengalami kendala pada proses koordinasi antar institusi pemerintah (Priyanto & Hentika, 2024). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami dalam implementasi perlu adanya koordinasi yang terjalin antar aspek yang berkaitan.

Peran pemerintah digambarkan sebagai pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan dan nilai-nilai pada masyarakat. Pemerintah dalam perspektif *New Public Service* (NPS) yakni pelayan publik tidak hanya bertanggung jawab kepada tuntutan “para pelanggan,” namun lebih tepatnya fokus terhadap pembangunan hubungan kepercayaan serta kolaborasi dengan dan di antara warga negara (Barsei et al., 2023; Priyanto, 2023). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami pemerintah berperan sebagai pelayan publik yang memiliki kewenangan untuk melayani warga negara. NPS menekankan bahwa pemerintah harus berfokus pada segala hal yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Bagan 1 Penanganan Anak Jalanan Melalui Pendekatan *Quadruple Helix*



Sumber: Dikelola peneliti berdasarkan model *quadruple helix* yang diadopsi dari pemikiran Arnkil, et al. (2010)

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pelayan masyarakat harus mampu mengentas tuntas permasalahan sosial terkait anak jalanan (Pratiwi et al., 2024). Sebab jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani, besar kemungkinan banyaknya pendatang dari daerah lain untuk melakukan aktivitas yang dilarang, salah satu contohnya adalah anak jalanan yang mengemis, mengemis, dan menggelandang di tepi jalan. Upaya pemerintah tersebut tidak dapat berjalan tanpa kontribusi *stakeholder*, maka pemerintah memerlukan partner untuk berkolaborasi dalam mengupayakan kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui regulasi perda nomor 7 tahun 2018 sebagai pedoman dalam mengentas keberadaan anak jalanan di *traffic light* di Kabupaten Banyuwangi. Berkolaborasi bersama sektor swasta serta masyarakat dalam upaya memberdayakan anak jalanan dan mewujudkan KLA.

Informan Henik Setyorini selaku Kepala DinsosPPKB Kabupaten Banyuwangi menjelaskan: “Peran serta seluruh *stakeholder* ini sangat penting, baik dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat untuk dapat saling bahu-membahu mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA).” (Hasil wawancara, Januari 2025).

Informan Nanang selaku Operator Program Kabupaten Layak Anak menyebutkan beberapa klaster yang menjadi fokus dalam pengembangan program KLA, yakni meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus bagi anak. Dalam mencapai keberhasilan, memerlukan indikator untuk menilai pencapaian dan keberhasilan suatu program. Indikator keberhasilan merupakan ukuran atau patokan yang digunakan untuk menilai suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuannya. Beberapa klaster dalam pengembangan program KLA memiliki masing-masing indikator sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi perda nomor 7 tahun 2018. Informan Nanang selaku Operator Program Kabupaten Layak Anak menyampaikan: “Masing-masing klaster sudah ditentukan indikatornya sesuai yang tertera pada Permen PPPA No 12 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA, sehingga dapat mempermudah kami untuk mengukur keberhasilan implementasi KLA.” (Hasil wawancara, Februari 2025).

Tabel 2. Indikator KLA

Klaster	Indikator
Hak Sipil dan Kebebasan	1. Kepemilikan akta kelahiran 2. Ketersediaan Informasi Layak Anak (ILA) 3. Pelembagaan partisipasi anak
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1. Pencegahan perkawinan anak 2. Konsultasi pengasuhan anak 3. Pengembangan PAUD-HI 4. Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	1. Ketersediaan infrastruktur ramah anak 2. Persalinan di fasilitas kesehatan 3. Status gizi balita 4. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA)
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang	1. Akses pendidikan inklusif dan berkualitas 2. Fasilitas pendidikan ramah anak

	3. Pemanfaatan waktu luang untuk kreativitas dan budaya
Perlindungan Khusus	1. Pelayanan bagi korban kekerasan dan eksploitasi
	2. Perlindungan anak dari pornografi, NAPZA, dan HIV/AIDS
	3. Perlindungan anak dalam situasi darurat
	4. Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum

Sumber: Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program KLA, Kabupaten Banyuwangi mampu memperoleh penghargaan berturut-turut. Tingkatan pencapaian KLA dikategorikan berdasarkan skor evaluasi yang didapat dari berbagai indikator KLA. Adapun kategori penghargaan KLA yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi yakni:

Tabel 3. Penghargaan KLA Kabupaten Banyuwangi

Kategori	Tahun
Pratama	2016
Madya	2021
Nindya	2023

Sumber: DinsosPPKB Kabupaten Banyuwangi 2024

Setiap tingkatan penghargaan yang diperoleh mencerminkan seberapa jauh Kabupaten Banyuwangi telah berhasil berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak. Di sisi lain, keberadaan anak jalanan di *traffic light* masih menjadi tanda tanya berkenaan dengan pencapaian yang diperoleh Kabupaten Banyuwangi. Dalam perda nomor 7 tahun 2018 menyebutkan salah satu anak yang dikategorikan sebagai sasaran penerapan KLA ialah anak jalanan. Namun pada realita di lapangan, anak jalanan masih mudah ditemui khususnya di kawasan *traffic light*. Menyikapi situasi tersebut, Informan Suhari selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial menyampaikan: “Kami selalu menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi, dalam hal ini untuk mengentas keberadaan anak jalanan. Tetapi, tidak mudah mengatasi anak jalanan. Karena kami tidak bisa memaksakan kehendak mereka.” (Hasil wawancara, Januari 2025).

Perlu diketahui, anak jalanan tidak sepenuhnya penduduk asli wilayah tersebut. Dalam hal ini (Pratiwi et al., 2024) menyampaikan bahwa sebagian anak jalanan seperti pengamen dan pengemis yang masih di bawah umur, bukan penduduk asli Kabupaten Banyuwangi. Informan Suhari selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial menjelaskan: “Khusus penanganan anak jalanan yang terindikasi berasal dari luar kota, akan segera kita kembalikan ke kota asalnya dengan mengkoordinasi Dinsos kota yang berkaitan. Khusus anak jalanan yang merupakan penduduk asli Kabupaten Banyuwangi, kami kembalikan ke orang tuanya. Lalu bagi yang putus sekolah, pemerintah telah menyediakan panti asuhan untuk memberi mereka pembinaan, membiayai sekolah, dan menanggung biaya hidupnya. Dana yang digunakan juga dana dari pemerintah.” (Hasil wawancara, Februari 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi telah melakukan berbagai upaya untuk menangani fenomena anak jalanan. Namun dalam pelaksanaannya, Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi menghadapi beberapa kendala. Hal tersebut dapat dilihat dari sulit diaturnya anak jalanan dan kurangnya kesadaran mereka. Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi tidak hanya menjadi implementor tunggal

dalam penerapan Program Kabupaten Layak Anak, melainkan juga melibatkan berbagai *stakeholder* seperti pihak swasta, akademisi, dan komunitas untuk turut membantu dan memberikan kontribusinya. Dinsos PPKB juga memastikan bahwa kolaborasi berjalan beriringan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Unsur Swasta sebagai pihak yang turut berkontribusi melalui program c (CSR) dalam memberdayakan anak jalanan di *traffic light* Kabupaten Banyuwangi. Huruf b dan c pada Pasal 7 dalam perda nomor 3 tahun 2014 menjelaskan terkait manfaat dari TSP atau CSR bagi pemerintah daerah dan masyarakat: “Bagi masyarakat, TSP dapat membantu meningkatkan kesejahteraan, kenyamanan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. ... Sedangkan bagi pemerintah daerah, TSP berguna untuk menumbuhkan komitmen bersama dalam membantu mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.” Mendasari uraian tersebut, dapat diketahui swasta dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosialnya, khususnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi kesenjangan di tengah masyarakat dan membantu pemerintah daerah mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Banyuwangi, didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, menegaskan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Perusahaan melalui penerapan CSR menyalurkan kontribusinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada lingkungan masyarakat dan lingkungan industri. Dalam hal ini, sektor swasta menjadi salah satu aspek yang mampu memberikan dukungan melalui pembiayaan dan penyediaan dalam rangka pemberdayaan anak jalanan di *traffic light* Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan pihak swasta berperan aktif dalam keberlangsungan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Banyuwangi. Pihak swasta menjalin hubungan kerja sama secara ekologis dengan Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi melalui dukungan pendanaan, fasilitas dan dalam memberikan memberdayakan anak jalanan yang ada di *traffic light* Kabupaten Banyuwangi.

Unsur Akademisi juga turut memberikan kontribusinya melalui riset atau penelitian yang dilakukan. Akademisi membantu *stakeholder* lainnya dalam mendapatkan informasi dari anak jalanan. Seperti dalam melakukan penelitian, akademisi akan menggunakan metode observasi dan wawancara. Oleh karenanya, melalui kedua metode tersebut akademisi mampu mengamati dan mengulik data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab munculnya anak jalanan di *traffic light* Kabupaten Banyuwangi. Posisi akademisi dalam dimensi pembangunan sebagai pilar utama pada penciptaan dan pengembangan pengetahuan baru yang mendorong inovasi. Pengetahuan dasar dan terapan yang dihasilkan akademisi dapat diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Akademisi merancang melalui metodologi penelitian guna mengukur impact dari kebijakan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi (Arnkil et al., 2010; Rinanda & Cen, 2022; Solichah et al., 2022). Feedback yang diberikan oleh akademisi penting untuk dilakukannya penyesuaian serta perbaikan dari penerapan suatu kebijakan agar lebih efektif.

Kepala Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi sebagai perwakilan pemerintah dalam menangani keberadaan anak jalanan, mempersilahkan para akademisi yang ada di Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan kontribusinya. Partisipasi akademisi sangatlah membantu pada berjalannya program, serta sebagai pertimbangan dalam proses evaluasi program. Berdasarkan hasil penelitian, Dinsos PPKB Kabupaten Banyuwangi akan

bersikap terbuka dalam menerima partisipasi akademisi di Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan peranannya. Akademisi tidak hanya mampu berkontribusi melalui penelitian ilmiah, akan tetapi juga berperan aktif dalam menyampaikan informasi serta idenya kepada masyarakat, dan memberikan rekomendasi berdasarkan data lapangan untuk kebijakan publik.

Unsur Komunitas atau disebut juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan penting dalam penanganan anak jalanan. LSM melakukan identifikasi serta mengumpulkan informasi terkait kondisi anak jalanan, baik dari segi kebutuhan dasar mereka, preferensi, ataupun tantangan yang anak jalanan hadapi dalam kehidupannya sehari-hari. LSM juga dapat menyelenggarakan program partisipatif yang mengikutsertakan masyarakat setempat, untuk menampung umpan balik terkait solusi yang dianggap efektif dalam mengatasi permasalahan anak jalanan (Arnkil et al., 2010).

Sebagai organisasi non-pemerintah, LSM berfungsi sebagai pengawas dalam implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Keberadaan LSM memberikan dimensi tambahan pada administrasi publik, yakni elemen partisipasi masyarakat dan pengawasan eksternal terhadap kinerja pemerintah. Informan Irfan Hidayat selaku Ketua LSM Forum Rogojampi Bersatu (FRB) mengemukakan: “Tidak cukup dengan pendampingan saja, kami juga merangkul mereka agar bisa merasa nyaman dan tidak merasa diasingkan oleh masyarakat. Kami sebagai organisasi non-pemerintah akan terus mengawal dan mengawasi berjalannya program KLA, sesuai dengan landasan peraturannya yaitu perda nomor 7 tahun 2018.” (Hasil wawancara, Desember 2024).

Pada hakekatnya, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki harkat dan martabat. Pengentasan kemiskinan bukan sesuatu yang mudah, solusi lain yang dapat ditempuh adalah dengan memberdayakan anak jalanan (Bertus et al., 2022). LSM merupakan organisasi non-profit dan berdiri secara mandiri berbasis anggota yang mengkombinasikan pendanaan dari sektor pemerintahan dan sektor swasta (Widjajani et al., 2016). Informan Rofik selaku Sekretaris LSM Forum Rogojampi Bersatu menyampaikan: “Kami ada program pendukung dalam upaya menangani keberadaan anak jalanan, yaitu Anak Kreatif Banyuwangi. Dalam program tersebut, kami mengajak anak jalanan untuk mengekspresikan kreatifitasnya melalui pengajaran kerajinan dan seni lainnya. Dari yang paling sederhana seperti origami, kerajinan dari bambu, hingga seni melukis. Dalam pelaksanaan program tersebut, kami bekerja sama dengan masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin dan seniman yang ada di Kecamatan Rogojampi. Dan sudah sekitar 20 lebih anak jalanan yang berpartisipasi, terhitung sejak tahun 2022” (Hasil wawancara, Desember 2024).

LSM sebagai alat komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, namun juga memastikan terciptanya dialog yang terbuka dan konstruktif, dan memperkuat hubungan antara *stakeholder* (Persiliya et al., 2020). Diperlukannya partisipasi aktif dari masyarakat serta melibatkan seluruh elemen, maka dibutuhkan forum ruang publik sebagai sarana komunikasi antar *stakeholder* untuk mewujudkan kolaborasi yang optimal (Priyanto, 2024; Sriyono, 2024). Informan Lilikh Maslikah selaku Ketua Lembaga Perempuan Banyuwangi (B-WOMEN) mengemukakan: “Sebenarnya melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan anak jalanan bukan hal yang mudah, karena masing-masing dari anak jalanan memiliki karakteristik dan watak yang berbeda-beda. Kami juga membuka ruang untuk publik, baik masyarakat dan pihak lainnya untuk turut membantu” (Hasil wawancara, Desember 2024).

Informan Rina Khoirotin selaku Sekretaris Lembaga Perempuan Banyuwangi (B-WOMEN) menjelaskan: “Ada banyak upaya kami dalam membantu pemerintah menangani anak jalanan, salah satunya dengan memberdayakan mereka. Namun hal tersebut tidak mudah, karena jika hari ini kita mendatangi anak jalanan di suatu tempat, maka besoknya anak jalanan tersebut sudah tidak ada di tempat yang sama.” (Hasil wawancara, Desember 2024).

Penjelasan dari informan Lilikh dan Rina tersebut menunjukkan kendala yang dihadapi, mengingat anak jalanan tidak selalu akan menetap di tempat yang sama. Sehingga perlu dilakukan tindakan segera, tanpa mengulur waktu agar dapat mencapai efisiensi. Unsur komunitas dalam implementasi kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap atau elemen pendukung saja, namun juga berfungsi sebagai pengawas eksternal terhadap kinerja pemerintah dan sebagai elemen masyarakat yang partisipatif.

KESIMPULAN

Kolaborasi yang dilakukan oleh *stakeholder* sudah menunjukkan upaya besar untuk keberlanjutan Program Kabupaten Layak Anak khususnya pada anak jalanan di *traffic light* meski terdapat beberapa kendala. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa sinergi yang lebih kuat antar *stakeholder* tidak hanya akan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat jaringan dukungan bagi anak jalanan. Selain itu, pendekatan kolaboratif dapat menciptakan ruang bagi inovasi dan pengembangan praktik terbaik dalam penanganan isu-isu sosial, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Dengan demikian, keberlanjutan program akan lebih terjamin, dan anak jalanan dapat memperoleh perlindungan serta kesempatan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

BIBLIOGRAFI

- Alem, H. W., & Laha, A. (2016). Livelihood of Street Children and the Role of Social Intervention: Insights from Literature Using Meta-Analysis. In *Child Development Research* (Vol. 2016). <https://doi.org/10.1155/2016/3582101>
- Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: A review. *Scientific African*, 12, e00756. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2021.e00756>
- Arnkil, R. A., Jarvensivu, A., Korski, P., Piirainen, T., Järvensivu, A., Koski, P., & Piirainen, T. (2010). Exploring Quadruple Helix: Outlining user-oriented Innovation Models. In *Tampere: The CLIQ* (Issue September 2014).
- Barsei, A. N., Sipahutar, N. Y. P., Prasetyo, A. G., & Listanto, V. (2023). Inovasi Pelayanan Kesehatan Jiwa dari Perspektif New Public Service (Studi Kasus Inovasi AKSI LILIN Kabupaten Lebak). *Inovasi*, 20(2). <https://doi.org/10.33626/inovasi.v20i2.773>
- Bertus, D. C., Hulukati, W., & Usman, I. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Menjadi Anak Jalanan di Kota Gorontalo. *Journal of Guidance Dan Counseling*, 2(1). <https://doi.org/10.37411/sjgc.v2i1.1343>
- Dwiki Faiz Sarvianto. (2020). Sisi Masalah Kemiskinan dari Sustainable Development Goals Melalui Perspektif Ekologi Manusia. *Jurnal Ekologi, Masyarakat Dan Sains*, 1(2). <https://doi.org/10.55448/ems.v1i2.11>
- Gayapersad, A., Embleton, L., Shah, P., Kiptui, R., Ayuku, D., & Braitstein, P. (2023).

- Using a sociological conceptualization of stigma to explore the social processes of stigma and discrimination of children in street situations in western Kenya. *Child Abuse & Neglect*, 139, 104803. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104803>
- Julien, G. (2022). Traits of Street Children. *Educational Research and Reviews*, 17(5), 160–167.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.
- Megaretta, E., & Trisno, R. (2021). Pendekatan Narasi Arsitektur Pada Wadah Komunitas Anak Jalanan. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 3(1). <https://doi.org/10.24912/stupa.v3i1.10782>
- Persiliya, M., Tandyonomanu, D., Sos, S., & Si, M. (2020). Peran Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Upaya Pemeberdayaan Perempuan Pekerja Skes Komersian Di Kabupaten Kediri (Studi Kasus LSM SUAR Indonesia). *Commercium*, 02(02).
- Pratiwi, N. E., Rahayu, S., & Priyanto, H. (2024). Fungsi Pemerintah Dalam Penanganan Pengemis dan Pengamen Anak di Kecamatan Banyuwangi. *KATARSIS*, 1(2), 24–33. <https://doi.org/10.62734/kts.v1i2.230>
- Priyanto, H. (2023). The Quality of Education for the People of Banyuwangi: Analysis Study of the Banyuwangi Cerdas Program. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(2), 1007–1018. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i2.3788>
- Priyanto, H. (2024). Public Service Quality in Banyuwangi District: A Study in Welfare Perspective. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1), 77–94. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i1.48657>
- Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2024). Collaborative Penta Helix Stakeholders dalam Pembangunan Inklusi yang Berkelanjutan; Suatu Diskursus Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah Dan Ilmu*, 24(1), 67–87. <https://doi.org/10.37849/midi.v24i1.404>
- Priyanto, H., & Noviana, N. (2023). Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*.
- Rinanda, T., & Cen, C. C. (2022). Kajian Peran Akademisi dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosity*, 2(4), 22–28. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i4.470>
- Solichah, Merita, R., & Sa'diyah, D. (2022). Peran Akademisi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/doi.org/10.53429/ngaliman.v1i2.617>
- Sriyono, S. (2024). Strategi Pengembangan Pariwisata Desa Tablanusu di Kabupaten Jayapura. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.37849/mici.v6i1.406>
- Widjajani, N., Fajarwati, A., & Hidayat, A. (2016). Model Quadruple Helix sebagai Model Inovasi Daerah. *Sosiohumanitas*, 18(1). <https://doi.org/10.36555/SOSIOHUMANITAS.V18I1.60>
- Zakiah, I. H., & Priyanto, H. (2024). Analisis Inovasi Ekonomi Kreatif Usaha Homestay Di Desa Tamansari Kabupaten Banyuwangi: Suatu Pemberdayaan Efektif atau Eksistensi Proyek Pemerintah Desa. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 2715–3339. <https://doi.org/https://doi.org/10.37849/mici.v6i1.408>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).